

**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

Handwritten signature/initials in blue ink.

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 13);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 13) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

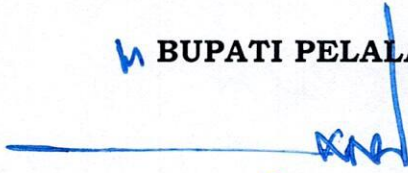
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI PELALAWAN,

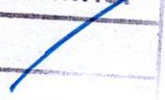

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

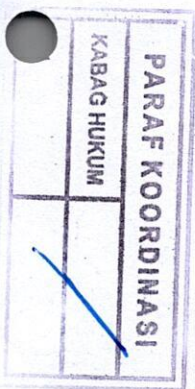
BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 24.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 24 TAHUN 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
 SATUAN STANDAR HARGA TERTINGGI
 BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN
 PELALAWAN TAHUN 2024**

PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1. STANDAR BIAYA UMUM (SBU)						
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT (Tunda Bayar 2023)	Kegiatan	9.450.000	5.1.02.01.01.0012
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Inagenpro	Padat, cair	Sampel	33.265.000	5.1.02.01.01.0002
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Pembayaran Belanja Internet Psc, Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Air Isi Ulang, Isi Ulang Tabung Oksigen) Dan Isi Ulang Tabung Gas Psc 119 Ta.2023	Sub. Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Spdgt) Ta.2023 (Tunda Bayar 2023)	Kegiatan	3.775.808	5.1.02.02.01.0063
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor (Kantor Lurah)	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Tunda Bayar 2023)	Kegiatan	4.531.000	5.1.02.01.01.0024
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor (Kantor Camat)	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Tunda Bayar 2023)	Kegiatan	6.466.000	5.1.02.01.01.0024
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota (Tunda Bayar 2023)	Kegiatan	1.820.400	5.1.02.01.01.0026
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (TUNDA BAYAR 2023)	Kegiatan	960.000	5.1.02.01.01.0052
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengawasan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (TUNDA BAYAR 2023)	Paket	14.185.800	5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pengawasan Jaringan Sumur Bor dan Jaringan Pengairan	Pengawasan (Perubahan)	Paket	14.071.914	5.1.02.01.01.0039



KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 2"	Nan	Meter	920.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan HDPE Ø 6"	Nan	Meter	1.320.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 4"	Nan	Meter	1.020.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 6"	Nan	Meter	1.220.000	5.1.02.03.04.0120

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	